

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut (Saputra dkk, 2014).

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah (Wiguna dkk, 2015).

Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai

dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2006).

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ulum, 2012).

Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan dan mengelola urusan daerah akan memperlihatkan performa (kinerja) daerah. Dalam menjalankan urusan tersebut, pemerintah daerah tidak menjadi satu-satunya pelaku. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah saja, melainkan perlu ada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma good governance yang mengedepankan keterpaduan antara pemerintah (state), swasta (private), dan masyarakat (society) sebagai suatu sistem (LAN, 2007). Oleh karena itu, kinerja daerah tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai suatu sistem penyelenggaraan otonomi daerah.

Widyananda (2008) dalam (Arifianti, 2013) Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menciptakan good

governance, yaitu dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, transparan, dan memenuhi tujuan pelayanan publik (efektif).

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menerapkan pengendalian intern. Pada kenyataannya pengendalian intern masih lemah dan kurangnya pemahaman perundang – undangan yang berlaku di SKPD mengenai pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah. Untuk itu diperlukan pengawasan, partisipasi masyarakat dan tanggungjawab dari pemerintah.

Arifianti (2013) penelitian ini mengulas mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipandang dari hasil pemeriksaan oleh BPK, seperti kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan\perundang-undangan, serta dari DPRD dan masyarakat yang digunakan sebagai pengawasan untuk mengetahui apakah otonomi daerah telah membuahkan capaian sesuai dengan yang diharapkan atau justru kontraproduktif dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) tahun 2015 Kabupaten Gorontalo mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa laporan keuangan pemerintahan. Opini BPK ini merupakan salah

satu ukuran kinerja pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Gorontalo masih terdapat beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 mengungkapkan sebanyak lima temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran dinas koperasi UMKM belum tertib
2. Pengenaan pajak atas bunga pada rekening bendahara dana JKN sebesar Rp 21.585.937,00
3. Pengelolaan persediaan pada tiga SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo belum tertib
4. Investasi permanen pada PT Bahana Swara Keagungan yang sudah tidak beroperasi belum dilakukan likuidasi dan belum ditarik asetnya
5. Pengelolaan aset tetap pada pemerintah kabupaten gorontalo belum tertib

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2015 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak enam temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kadar aspal pada Sembilan paket pekerjaan rehab/pemeliharaan dan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo tidak sesuai spesifikasi senilai Rp 209.409.000,00
2. Terdapat kekurangan penetapan SKRD untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan minimal sebesar Rp 2.963.000,00 dan belum dikenakan minimal sebesar Rp 36.912.000,00
3. Belanja bibit tanaman dan hewan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 79.731.600,00
4. Kekurangan penerimaan daerah atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebesar Rp 9.756.400,00 dan terdapat biaya perbaikan untuk kendaraan yang telah dijual/dihapus sebesar Rp 11.570.000,00
5. Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah berupa Bill hotel pada sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp 12.600.000,00
6. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah pada beberapa dinas di Kabupaten Gorontalo sebesar Rp 12.382.700,00.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selamaini kinerja pemerintah Kabupaten Gorontalo belum maksimal karena belum menerapkan pengawasandibidang pengelolaan keuangan daerah secara optimal dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance* pada kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Karakteristik

pelaksanaan *good governance* meliputi antara lain *transparency*, *responsiveness*, *consensusorientation*, *equity*, *efficiency*, dan *effectiveness*, serta *accountability* (Mardiasmo, 2006).

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya. Adiwirya dan Sudana (2015) Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. Dikaji secara parsial, ditemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif pada anggaran berbasis kinerja. selanjutnya Wiguna dkk (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan secara parsial pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Lebih lanjut hasil penelitian Coryanata (2015) menunjukkan bahwa semua variabel yang peneliti turunkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan *variable moderating*, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dkk (2015), perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek penelitian ini peneliti mengambil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gorontalo dan menggunakan *analysis path*, Sedangkan pada Wiguna dkk (2015) dimana objek penelitiannya hanya berfokus pada satu SKPD yakni Inspektorat..

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurang optimal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten gorontalo meskipun sudah mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
2. Banyaknya temuan-temuan untuk Kabupaten Gorontalo yang ditemukan oleh BPK menunjukkan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengawasan (X_1), akuntabilitas (X_2), dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3) secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y)
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan (X_1), akuntabilitas (X_2), transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3) secara parsial terhadap kinerja pemerintah daerah

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan (X_1), akuntabilitas (X_2), dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3) secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah (Y)
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (X_3) secara parsial terhadap kinerja pemerintah (Y)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis guna mendapatkan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi pengembangan ilmu akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja.
2. Bagi peneliti dapat memperoleh wawasan yang luas tentang kinerja pemerintah daerah terutama mengenai pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk menghasikan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.